



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KEBIJAKAN FISKAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DINI KUSUMAWATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **155804**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 15.821.620.000**

1. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.115.335.000
2. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.256.930.000
3. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 617.280.000
4. Tanah Seluas 44 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 424.380.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,  
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.893.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/53 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.149.260.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 656.580.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/161 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.907.045.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 2.801.310.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 318.000.000**

1. MOBIL, JEEP WRANGLER Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp.  
318.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 184.324.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.100.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	325.879.836
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	18.749.823.836
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.749.823.836

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.